



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 11543-11553
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai

Syarifah Atiyah^{1✉}, Lailani Fitria²

Program Studi Akuntansi, STIE Tuah Negeri, Dumai, Indonesia

Email: zsarifaatya99@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Akuntabilitas sektor publik menjadi peranan yang penting bagi setiap instansi pemerintahan. Kemajuan pemerintahan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan kinerja instansi serta penyusunan anggaran keuangan yang ditetapkan. Masih banyak instansi publik yang belum mencapai target dalam realisasi anggaran, oleh karena itu penulis meneliti objek laporan realisasi kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai di bulan Juli dan Agustus tahun 2022. Pada penelitian ini penulis menggunakan rumus rasio efektivitas yang digunakan untuk mengukur hubungan antara realisasi belanja modal dengan anggaran belanja modal. Didapatkan hasil bahwa realisasi kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai masih cukup rendah, dengan persentase realisasi di bawah 10%. Hasil Analisis Rasio efektivitas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai pada sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dalam 2 bulan berfluktuasi dengan rata-rata tingkat efisiensinya adalah sebesar 8,456% yang didapat dari bulan Juli sebesar 7,09% dan bulan Agustus sebesar 9,84%. Persentase ini tergolong dalam kriteria tidak efektif. Artinya Kinerja pengelolaan keuangan masih sangat rendah dan belum optimal karena pencapaian output berbanding inputnya tidak maksimal di bulan Juli dan Agustus tahun 2022.

Katakunci: laporan realisasi anggaran, kinerja keuangan, sarana dan prasarana

Abstract

Public sector accountability becomes an important role for every government agency. The progress of governance also has a close relationship with the performance of agencies and the preparation of the stipulated financial budget. There are still many public agencies that have not reached the target in terms of budget realization, therefore the authors researched the object realization report of oil palm plantation facilities and infrastructure activities at the Dumai City Food Crop Agriculture Office in July and August 2022. In this study the authors used the ratio formula of effectiveness used to measure the relationship between the realization of capital expenditure and the capital expenditure budget. The results showed that the realization of oil palm plantation facilities and infrastructure activities at the Dumai City Food Crop Agriculture Office was still quite low, with a percentage of realization below 10%. The results of analysis the effectiveness ratio show that the level of efficiency in the financial management of the Dumai City Food Crop Agriculture Office for oil palm plantation facilities and infrastructure within 2 months fluctuated with an average level of efficiency is 8.456% which was obtained from July at 7.09% and August at 9.84%. This percentage is classified as ineffective criteria. This means that financial management performance is still very low and not optimal because the achievement of output compared to input is not optimal in July and August 2022.

Keyword: reports on budget realization, financial performance, facilities and infrastructure

PENDAHULUAN

Instansi pemerintah atau sektor publik merupakan seluruh sistem pemerintahan yang berfungsi sebagai administrasi pemerintah mencakup seluruh bidang. Instansi pemerintah diketahui memperoleh kas atau dana pemasukan yang berdasarkan kepada APBN dan APBD. Dalam pertanggungjawaban instansi kepada pemerintahan publik dari periode waktu tertentu dibutuhkan adanya rencana berupa anggaran dari berbagai usulan pengeluaran dana dan berwujud finansial untuk nantinya dijadikan pertimbangan rencana manajemen dalam pengambilan keputusan dana pelayanan publik. Akuntansi sektor publik memiliki arti sebagai sistem atau aspek yang berpengaruh penting dan wajib diterapkan oleh setiap instansi pemerintah dalam pencapaian tujuan untuk melaporkan data berupa fakta kepada publik (Belinda & Costari, 2021)

Standar anggaran sektor publik dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila penggunaan anggaran mampu menciptakan keberhasilan atas kemajuan instansi yang terlibat dalam pencapaian seluruh aspek kesejahteraan. Perencanaan sistem anggaran yang tepat diperlukan untuk mewujudkan pelayanan umum yang berkualitas dan juga dengan tujuan menjadi dasar bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan serta untuk mengevaluasi anggaran dan administrasi guna meningkatkan keseimbangan operasi atau pengelolaan kepentingan pemerintah.

Pengukuran kinerja juga digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis keberhasilan maupun kegagalan kegiatan operasional sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah. Di samping itu pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran dibandingkan dengan rencana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dana yang dihimpun oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit salah satunya digunakan untuk kepentingan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, perlu diatur ketentuan mengenai penggunaan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit tersebut.

Mengingat permasalahan yang dihadapi oleh beberapa instansi sektor publik dalam pelaksanaan, perencanaan serta pelaporan anggaran keuangannya, oleh karena itu penulis membuat penelitian mengenai efektivitas anggaran terhadap kinerja keuangan dengan mengambil sampel laporan realisasi kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai di bulan Juli dan Agustus tahun 2022 guna mengetahui apakah laporan realisasi anggaran tersebut sudah berjalan dengan baik.

Anggaran adalah perencanaan kerja suatu organisasi atau instansi untuk masa depan yang kemudian akan diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal dan sistematis. Anggaran memprediksi tentang apa yang akan dikerjakan pada masa mendatang dan perkiraan seberapa besar dana yang akan dikeluarkan untuk mewujudkan rencana tersebut.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam instansi publik, anggaran menjadi alat pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang didanai publik. Penganggaran dalam instansi publik merupakan kegiatan yang penting karena berkaitan dengan alokasi dana untuk setiap program atau kegiatan. Anggaran memiliki ciri khusus yang umumnya mencakup satu periode bulan atau tahun. Batas waktu penyusunan anggaran akan dijadikan target rencana

kerja yang akan dilakukan. Anggaran pada suatu instansi dijadikan pedoman rencana, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan atas tindakan yang akan dilakukan pemerintah. Anggaran menjadi fungsi untuk membantu pemerintah dalam mencapai tujuan, meningkatkan keterbukaan kepada masyarakat, menciptakan keefektifan penyediaan serta perawatan barang dan jasa (Dona & Lestari, 2020)

Realisasi anggaran merupakan rencana pelaksanaan atas semua proses dan sasaran dana yang telah ditetapkan oleh instansi publik yang sudah terlaksana (Nurhafid, 2017). Berdasarkan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 1 ayat 4, menyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintahan pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam 1 (satu) periode pelaporan.

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran ini menjadi dasar dalam pelaporan keuangan mengenai dana anggaran belanja dan realisasi belanja, transfer, kelebihan maupun kekurangan dana, serta penggunaan biaya dari instansi yang melaporkan tersebut (Asoka, 2019). Laporan realisasi anggaran juga memiliki peran penting untuk menilai keuangan daerah. Sedangkan bagi masyarakat, laporan realisasi anggaran dapat meyakinkan masyarakat bahwa anggaran dari pemerintah telah digunakan secara tepat dan berhasil sesuai dengan jumlah anggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa pendapat di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa realisasi anggaran merupakan laporan atas persentase tercapainya rencana yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Laporan persentase ini yang kemudian akan menjadi pertimbangan bagi publik untuk memperoleh informasi komprehensif mengenai realisasi anggaran, dan bagi instansi untuk dapat mengelola dana operasional secara lebih efektif, sesuai alokasi budget, serta menjadi dasar evaluasi atas kinerja instansi pelaporan.

PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja keuangan adalah suatu keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja keuangan menggambarkan keberhasilan yang dinilai berdasarkan ukuran-ukuran angka dalam satuan nilai uang, yaitu dengan cara membandingkan realisasi keuangan berdasarkan anggarannya (Aini et al., 2020). Kinerja keuangan daerah merupakan suatu

ukuran hasil yang menggunakan indikator ekonomi daerah yang akan kemudian akan dianalisis (Sartika, 2019).

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan hanya untuk menggambarkan proses dana publik yang akan dibelanjakan, tetapi juga meliputi kemampuan yang bagaimana dana publik tersebut telah dibelanjakan secara berhati-hati, tepat dan efektif. Pada pembahasan ini digunakan analisis keuangan yang menggunakan rumus rasio efektivitas dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan serta dilaksanakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah nya.

Rasio Efektivitas adalah perbandingan antara keluaran dan tujuan, tingkat keberhasilan, tingkat keluaran, aturan, dan proses tertentu dari suatu organisasi atau instansi. (Faud, 2016) mengatakan bahwa rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mewujudkan proyeksi dana pendapatan asli daerah dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya. Semakin tinggi nilai rasio yang diperoleh atau semakin tinggi target yang dicapai, maka semakin efektif kinerja anggaran suatu instansi pemerintah, demikian pula sebaliknya. Menurut Mahsun (2016), rumus berikut digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas pendapatan asli daerah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Persentase tinggi atau kecil yang diperoleh dari hasil perhitungan menunjukkan kriteria untuk menilai apakah keuangan pemerintah daerah efektif atau tidak. Faktor-faktor berikut harus digunakan untuk menentukan apakah keuangan daerah efektif atau tidak:

1. Jika diperoleh nilai ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
2. Jika diperoleh nilai ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang
3. Jika diperoleh nilai ($x > 100\%$) berarti efektif

Dengan adanya analisis rasio efektivitas laporan keuangan maka dapat bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang terperinci, menghindari kesalahan dalam perhitungan pada laporan keuangan, menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan, dapat pula untuk meningkatkan keefektifan pengelolaan dana dan meningkatkan keuntungan bagi instansi.

Dari beberapa penjelasan maka dapat disimpulkan bahwa Rasio Efektivitas merupakan hubungan antara pengeluaran dana dengan target yang harus dicapai, untuk melihat kemampuan pemerintah dalam mewujudkan realisasi pendapatan daerah. Tingkat rasio

efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja pada laporan realisasi anggaran sektor publik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini untuk memperoleh kesimpulan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio efektivitas untuk menghitung keefektifan kinerja keuangan instansi. Hasil penelitian akan disajikan dengan mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Metode pengumpulan data primer didapat dari laporan realisasi kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit bulan Juli dan Agustus tahun 2022 yang dilakukan secara langsung pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai. Data tersebut kemudian dianalisis melalui reduksi data dan display data. Sedangkan pengumpulan data sekunder dan landasan teori dilakukan melalui kegiatan studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berikut merupakan laporan realisasi anggaran kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai bulan Juli dan Agustus tahun 2022 :

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SEKRETARIAT TIM
SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
Jl. Dermaga No. 5 Telp. (0765) 810253 Fax. (0765) 810253 Kode Pos 20223
Purnama - Dumai
e-mail: sekras@kotadumai.go.id

LAPORAN REALISASI KEGIATAN (100%)
SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI
BULAN JULI TAHUN 2022

NO	URAIAN	JUMLAH DANA	REALISASI			SISA DANA	%
			SD. BLN LALU	BULAN INI	SD. BLN INI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KABUPATEN							
C.6	SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (KABUPATEN DUMAI)	337.980.000	0	23.965.648	23.965.648	314.014.352	7,09
I	Operasional Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Kabupaten)	303.680.000	0	23.965.648	23.965.648	279.714.352	7,89
a	Belanja Pemeliharaan Dinas Paket	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0,00
	Pengiriman surat, dokumen, dll	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0,00
b	Belanja Bahan	14.640.000	0	985.000	985.000	13.655.000	16,42
	a. Administrasi, dokumentasi, fotocopy, penggantian kertas, dll	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0,00
	b. ATK dan bahan komputer	6.000.000	0	985.000	985.000	5.015.000	16,42
	c. Konsumsi Rapat berbagai	2.640.000	0	0	0	2.640.000	0,00
c	Belanja Honor Outrout Kegiatan	3.200.000	0	0	0	3.200.000	0,00
	a. Honor Tim	800.000	0	0	0	800.000	0,00
	b. Sekretaris	600.000	0	0	0	600.000	0,00
	c. Verifikasi Usulan	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0,00
d	Belanja Honor Operasional Sahaan Kerja	20.280.000	0	0	0	20.280.000	0,00
	a. Bendahara (1 org x 12 bulan)	5.040.000	0	0	0	5.040.000	0,00
	b. Staf Pembantu Keumaha (1 org x 12 bulan)	4.440.000	0	0	0	4.440.000	0,00
	c. Petugas Administrasi (10 org x 12 bulan)	10.800.000	0	0	0	10.800.000	0,00
e	Belanja Sewa	26.800.000	0	0	0	26.800.000	0,00
	a. Laptop	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0,00
	b. Printer	4.800.000	0	0	0	4.800.000	0,00
	c. Scanner	4.800.000	0	0	0	4.800.000	0,00
	d. Dapur	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0,00
	e. GPS (setara 4 bulan)	3.200.000	0	0	0	3.200.000	0,00
f	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	232.760.000	0	22.980.648	22.980.648	209.779.352	150,49
	a. Dalam rangka kegiatan sosialisasi dan pendampingan (P2S) Sarana di Desa	16.000.000	0	9.527.377	9.527.377	6.472.623	59,55
	b. Dalam rangka monitoring dan evaluasi ke pusat/ instansi terkait lain	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0,00
	c. Dalam rangka koordinasi dan komunikasi ke pusat/ instansi terkait lain	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0,00
	d. Dalam rangka pemantauan, monitoring di tingkat	17.000.000	0	0	0	17.000.000	0,00
	e. Dalam rangka menghadiri forum, rapat dan pertemuan	10.800.000	0	2.222.000	2.222.000	8.578.000	25,57
	f. Dalam rangka koordinasi dan komunikasi ke provinsi	10.800.000	0	0	0	10.800.000	0,00
	g. Dalam rangka menghadiri pertemuan/ konferensi di provinsi	15.960.000	0	11.231.271	11.231.271	4.728.729	71,17
	h. Kegiatan pelatihan/pengembangan sumber daya manusia	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0,00
	i. Dalam rangka verifikasi CPK, ke provinsi	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0,00
	l. Dalam rangka menghadiri dan menghadiri	19.200.000	0	0	0	19.200.000	0,00
	m. Lain-lain	19.200.000	0	0	0	19.200.000	0,00
II	Sosialisai Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten	34.300.000	0	0	0	34.300.000	0,00
a	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	34.300.000	0	0	0	34.300.000	0,00
	a. Pertemuan dalam rangka sosialisasi sarana dan prasarana kelapa sawit di kelas pengolah	8.300.000	0	0	0	8.300.000	0,00
	b. Perjalanan petugas kabupaten dalam rangka sosialisasi sarana dan prasarana kelapa sawit	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0,00
	c. Bantuan Transportasi	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0,00





PEMERINTAH KOTA DUMAI
SEKRETARIAT TIM
SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
Jl. Dermaga No. 8 Telp. (0765) 810253 Fax. (0765) 810253 Kode Pos 28223
Purabaya - Dumai
e-mail: sarpras@kotadumai@gmail.com

LAPORAN REALISASI KEGIATAN (100%)
SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI
BULAN AGUSTUS TAHUN 2022

NO	URAIAN	JUMLAH DANA	REALISASI			SISA DANA	%
			SD. BLN LALU	BULAN INI	SD. BLN INI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KABUPATEN							
C.6	SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (KABUPATEN DUMAI)	337.890.000	23.965.648	9.261.823	33.227.471	304.722.831	9,84
I	Operasional kegiatan sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Kabupaten)	303.680.000	23.965.648	9.261.823	33.227.471	279.412.829	16,19
a	Belanja Pengiriman Hasil Pan. Pemat. Pengangkutan sumbu, dikemas, dll	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0,00
b	Belanja Bahan	14.640.000	988.000	0	988.000	13.652.000	16,42
	a. Akumulasi, dokumentasi, fotokopi, pengangkutan, biaya, dll	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0,00
	b. ATK dan bahan komputer	9.000.000	988.000	0	988.000	8.012.000	11,42
	c. Konsumsi, biaya, pembelian	2.640.000	0	0	0	2.640.000	0,00
c	Belanja Honor Outband Kegiatan	3.200.000	0	0	0	3.200.000	0,00
	a. honor Tim	800.000	0	0	0	800.000	0,00
	b. honor lain	500.000	0	0	0	500.000	0,00
	c. honor lain lain	1.900.000	0	0	0	1.900.000	0,00
d	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	20.280.000	0	0	0	20.280.000	0,00
	a. honor Tim 11 org x 12 bulan	1.440.000	0	0	0	1.440.000	0,00
	b. honor Tim 11 org x 12 bulan	4.440.000	0	0	0	4.440.000	0,00
	c. honor Tim 11 org x 12 bulan	13.800.000	0	0	0	13.800.000	0,00
e	Belanja Sewa	26.800.000	0	0	0	26.800.000	0,00
	a. sewa	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0,00
	b. sewa	4.800.000	0	0	0	4.800.000	0,00
	c. sewa	4.800.000	0	0	0	4.800.000	0,00
	d. sewa	3.200.000	0	0	0	3.200.000	0,00
	e. sewa lainnya 4 bulan	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0,00
f	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	232.740.000	23.980.648	9.261.823	33.273.471	208.487.829	179,53
	a. Dalam rangka kegiatan koordinasi dan kerendahan hati	16.000.000	9.527.377	0	9.527.377	6.472.623	59,55
	b. Dalam rangka koordinasi dan kerendahan hati	17.000.000	0	0	0	17.000.000	0,00
	c. Dalam rangka koordinasi dan kerendahan hati ke pusat/ instansi lain	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0,00
	d. Dalam rangka penunjang pelaksanaan di pusat	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0,00
	e. Dalam rangka koordinasi dan kerendahan hati ke luar negeri	17.000.000	0	0	0	17.000.000	0,00
	f. Dalam rangka koordinasi dan kerendahan hati ke provinsi	11.800.000	2.227.000	0	2.227.000	9.573.000	20,57
	g. Dalam rangka koordinasi dan kerendahan hati ke kabupaten/kota	10.800.000	0	0	0	10.800.000	0,00
	h. Dalam rangka koordinasi dan kerendahan hati ke kecamatan	15.900.000	11.231.271	0	11.231.271	4.668.729	70,17
	i. Dalam rangka koordinasi dan kerendahan hati ke desa/kelurahan	20.800.000	0	0	0	20.800.000	0,00
	j. Dalam rangka koordinasi dan kerendahan hati ke kecamatan	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0,00
	k. Dalam rangka koordinasi dan kerendahan hati ke kecamatan	19.200.000	0	0	0	19.200.000	0,00
II	Sosialisai Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten	34.300.000	0	0	0	34.300.000	0,00
a	Belanja Perjalanan Dinas Pakat Meeting Dalam Kota	34.300.000	0	0	0	34.300.000	0,00
	a. Pertemuan dalam rangka koordinasi sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit di Kota Dumai	8.300.000	0	0	0	8.300.000	0,00
	b. Pertemuan dengan kabupaten/kota dalam rangka sosialisasi sarana dan prasarana kelapa sawit	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0,00
	c. Belanja lainnya	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0,00



Sumber : Dinas

Ketahanan Pangan

dan Pertanian Kota Dumai

Berdasarkan data lampiran tersebut, dapat dilihat bahwa dana yang terealisasi berfluktuasi dalam artian tidak stabil, maka perlu dilakukan penilaian kinerja keuangan berdasarkan tingkat rasio efektivitas agar dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai dalam mengelola keuangannya. Berikut pembahasan dari analisis laporan realisasi anggaran terhadap kinerja keuangan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai dengan perhitungan realisasi selama 2 bulan pada bulan Juli dan Agustus tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Laporan Realisasi Kegiatan (100%) Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Dumai Bulan Juli 2022.

NO	URAIAN	JUMLAH DANA	REALISASI			SISA DANA	PERS ENTA SE (%)
			SD. BLN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI		
1	Operasional Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Kabupaten)	303.680.000	0	23.965.648	23.965.648	279.714.352	7,89

2	Sosialisasi Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten	34.300.000	0	0	0	34.300.000	0,00
	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Kota Dumai)	337.980.000	0	23.965.648	23.965.648	314.014.352	7,09

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rp 23.965.648}}{\text{Rp 337.980.000}} \times 100\% = 7,09$$

Laporan realisasi kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai pada bulan Juli 2022 menunjukkan adanya dua jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu operasional kegiatan dan sosialisasi kegiatan.

Operasional kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai memiliki jumlah dana sebesar Rp 303.680.000, dan realisasi sampai dengan bulan lalu belum dilakukan. Namun, pada bulan ini terdapat realisasi sebesar Rp 23.965.648, sehingga total realisasi sampai dengan bulan ini adalah Rp 23.965.648. Sisa dana yang dimiliki sebesar Rp 279.714.352 dengan persentase realisasi sebesar 7,89%.

Sementara itu, kegiatan sosialisasi sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai memiliki jumlah dana sebesar Rp 34.300.000 dan realisasi sampai dengan bulan lalu belum dilakukan. Pada bulan ini, belum ada realisasi yang dilakukan, sehingga realisasi sampai dengan bulan ini juga masih 0. Sisa dana yang dimiliki masih sebesar Rp 34.300.000 dengan persentase realisasi sebesar 0,00%.

Secara keseluruhan, kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai memiliki jumlah dana sebesar Rp 337.980.000. Realisasi sampai dengan bulan lalu belum dilakukan, namun pada bulan ini terdapat realisasi sebesar Rp 23.965.648, sehingga total realisasi sampai dengan bulan ini adalah Rp 23.965.648. Sisa dana yang dimiliki sebesar Rp 314.014.352 dengan persentase realisasi sebesar 7,09%.

Tabel 2. Laporan Realisasi Kegiatan (100%) Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Dumai Bulan Agustus 2022

NO	URAIAN	JUMLAH DANA	REALISASI			SISA DANA	PERSentase (%)
			SD. BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI		
1	Operasional Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Kabupaten)	303.680.000	23.965.648	9.291.523	33.257.171	270.422.829	10,95
2	Sosialisasi Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten	34.300.000	0	0	0	34.300.000	0,00
	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Kota Dumai)	337.980.000	23.965.648	9.291.523	33.257.171	304.722.829	9,84

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rp } 33.257.171}{\text{Rp } 337.980.000} \times 100\% = 9,84$$

Laporan di atas adalah tentang realisasi kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai pada bulan Agustus 2022. Operasional Kegiatan Sarana dan Prasarana perkebunan kelapa sawit: Kegiatan ini memiliki jumlah dana sebesar Rp 303.680.000, dan realisasi sampai dengan bulan lalu sebesar Rp 23.965.648. Realisasi kegiatan pada bulan ini sebesar Rp 9.291.523, sehingga total realisasi

sampai dengan bulan ini adalah sebesar Rp 33.257.171. Sisa dana yang dimiliki adalah sebesar Rp 270.422.829 dengan persentase realisasi sebesar 10,95%.

Sosialisasi sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit: Kegiatan ini memiliki jumlah dana sebesar Rp 34.300.000, dan realisasi sampai dengan bulan lalu adalah 0. Realisasi kegiatan pada bulan ini juga 0, sehingga total realisasi sampai dengan bulan ini adalah 0. Sisa dana yang dimiliki adalah sebesar Rp 34.300.000 dengan persentase realisasi sebesar 0,00%.

Keseluruhan jumlah sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dumai: Kegiatan ini memiliki jumlah dana sebesar Rp 337.980.000, dan realisasi sampai dengan bulan lalu sebesar Rp 23.965.648. Realisasi kegiatan pada bulan ini sebesar Rp 9.291.523, sehingga total realisasi sampai dengan bulan ini adalah sebesar Rp 33.257.171. Sisa dana yang dimiliki adalah sebesar 304.722.829 dengan persentase realisasi sebesar 9,84%.

Dari laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai masih dalam tahap awal dan masih membutuhkan banyak realisasi. Persentase realisasi masih cukup rendah, yaitu sekitar 9,84% hingga 10,95%. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan persentase realisasi agar kegiatan dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap penggunaan dana yang sudah dilakukan dan pemantauan yang lebih ketat terhadap proses realisasi kegiatan agar tidak terjadi penumpukan dana yang tidak efektif dan efisien.

SIMPULAN

Dari laporan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai masih cukup rendah, dengan persentase realisasi di bawah 10%. Hasil Analisis Rasio efektivitas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai pada sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dalam 2 bulan berfluktuasi dengan rata-rata tingkat efisiensinya adalah sebesar 8,456% yang didapat dari bulan Juli sebesar 7,09% dan bulan Agustus sebesar 9,84%. Persentase ini tergolong dalam kriteria tidak efektif. Artinya Kinerja pengelolaan keuangan masih sangat rendah dan belum optimal karena pencapaian output berbanding inputnya tidak maksimal di bulan Juli dan Agustus tahun 2022.

Adapun saran yang mungkin bermanfaat untuk peningkatan kualitas kinerja instansi tersebut, yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Perlu melakukan evaluasi dan upaya yang lebih maksimal dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat meningkatkan

efektivitas dan efisiensi penggunaan dana yang disediakan. Perlu juga dilakukan langkah-langkah yang lebih strategis dalam memperkenalkan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit kepada umum sehingga bisa menciptakan kesadaran masyarakat tentang manfaat dari sarana dan prasarana tersebut dan agar anggaran dana dapat terealisasi secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, H., Kenamon, M., & Anggraini, Y. (2020). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Oku Periode 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 18.
- Belinda, P. A., & Costari, N. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58–77.
- Asoka (2019). Analisis efektivitas realisasi anggaran belanja modal dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten musi banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)* 2(2), 76–91.
- Dona, E. M., & Lestari, V. A. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 5. No 2. 135-144.
- Faud, M. Ramli. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bogor : Ghalia Indonesia
- Mahsun, Mohamad. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE
- Nurhafid, A. (2017). Tinjauan atas Penyusunan Anggaran dan Realisasinya sebagai Alat Penilaian Kinerja Perusahaan pada PT Taspen (Persero) KCU Bandung. *STIE Ekuitas*, 10–27.
- Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Jurnal Inovasi Bisnis* 7 (2019), 147-153.
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.